

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Chazawi, Adami. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).
- \_\_\_\_\_. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2005).
- Darmansyah. *Kamus Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang disempurnakan*. Cetakan ke-1. (Jakarta: Batavia Press, 2008).
- Efendi, Tolib. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia*. (Malang: Setara Press, 2014).
- Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. *Pedoman Penulisan Skripsi Bidang Hukum*. (Jakarta: Peraturan Dekan FH-Untar Nomor 015-D/FHUNTAR/II/2011.2011).
- Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*. Cetakan ke-2. (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2013).
- Gunawan, Markus. *Buku Pintar Calon Anggota dan Anggota Legislatif (DPR, DPRD, dan DPD)*. (Jakarta: Visimedia Pustaka, 2008).
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan kedua. (Jakarta: Rineka Cpta, 1994).
- Huda, Cairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Cetakan ke-4. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Sinar Baru, 1984).
- Lamintang,P.A.F. dan Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Marzuki,Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. (Jakarta: Kencana,2005).
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan ke-7. (Jakarta: Rhineka Cipta, 2002).

- Muladi, dan Dwidja Prayitno. *Pertanggungjawaban korporasi dalam Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. (Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1991).
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya*. (Bandung: PT. Alumni, 2007).
- Nawawi, Muladi Barda. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Cetakan ke-2. (Bandung: Penerbit Alumni, 1992).
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015).
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1982).
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Edisi kedua. (Bandung: Eresco, 1986).
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1997).
- Ramiyanto. *Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana Di Dalam Hukum Positif dan Perkembangannya*. (Jakarta: C&A, 2016).
- Saleh, Roeslah. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. (Jakarta: Centra, 1983).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan ke-3. (Jakarta: UI Press, 1986).
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan ke-3. (Jakarta: UI Press, 2007).
- Sudarto. *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*. (Bandung: Sinar Baru, 1983).
- \_\_\_\_\_. *Hukum Pidana I*. cetakan ke-1. (Semarang: Yayasan Prof. Sudarto, 1990).
- Sunggono, Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cetakan keenam. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- Syafrudin, Ateng. *Hubungan Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. (Bandung: Tarsito, 1982).
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. *Manajemen Publik*. (Jakarta: Grasindo, 2005).

Tubangu, Nur Asih. *Pemalsuan Surat*. (Jakarta: FH UI, 1968).

Viswandro. Et al. *Mengenal Profesi Penegak Hukum*. Cetakan ke-1. (Yogyakarta: penerbit Medpress Digital, 2015).

Wiratma, I Made Leo. et al. *Panduan Lengkap Pemilu 2019*. (Jakarta: Formappi, 2018).

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660)*.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)*.

\_\_\_\_\_. *Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)*.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316)*.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)*.

## **C. Putusan**

Indonesia. *Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor: 405/Pid.Sus/2015/PN.Llg.*

\_\_\_\_\_. *Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 97/Pid/2015/PT.PLG.*

\_\_\_\_\_. *Putusan Mahkamah Agung Nomor: 196 K/Pid.Sus/2016.*

**D. Artikel**

Karina,Angel,Michelle. “Kajian Yuridis Terhadap Tentang Pemalsuan Pemalsuan Ijazah Menurut Pasal 263 dan 264 KUHP”. *Lex Crimen* Vol. V Tahun 2016.

**E. Internet**

Anonim. “Pengertian Ijazah”, <http://.pengertianmenurutparaahli.net>, 25 Juni 2019.